

## RELEVANSI KONSEP ASHABIYAH IBNU KHALDUN TERHADAP ISU EKONOMI POLITIK DI YORDANIA

**Nurur Rahmah Nia Sholihah<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Malang<sup>1</sup>

[rahmania882@gmail.com](mailto:rahmania882@gmail.com)<sup>1</sup>

**Gonda Yumitro<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Malang<sup>2</sup>

[gonda@umm.ac.id](mailto:gonda@umm.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima: 4 Oktober 2022

Disetujui: 21 Desember 2022

Dipublikasikan: 22 Desember 2022

### ***Abstract***

*This study evaluates and analyzes the concept of ashabiyah with its relationship in economic and political issues that occur in Jordan. The topic is important because humans can be a trigger for the emergence of civilization and progress in the world. The development of the economy with the people or power of ashabiyah will have an impact on the synergy of ashabiyah in other fields. The characteristics of government in central Timur are different from the general form of government in Europe, where many of the countries in the Middle East have gained legitimacy from the large role of tribal groups. Besides the importance of ibn Khaldun's concept, there is a relevance between modern and tribal politics in the Middle East that can influence the country's political economy. This research applied descriptive research techniques and qualitative research methodologies analysis obtained from journals and books using the Publish or Perish application related to the research theme. Researchers found that the country of Jordan is not as strong as other Arab countries but can maintain economic and political stability amid the vulnerability to the influence of conflicts around Jordan.*

**Keywords:** *Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Ekonomi Politik, Yordania*

### **Abstrak**

Penelitian ini melakukan evaluasi dan menganalisis konsep ashabiyah dengan hubungannya dalam isu ekonomi maupun politik yang terjadi di Yordania, pasca pandemic covid 19 Yordania mengalami kontraksi yang hebat dalam sejarah krisis ekonomi terutama. Topik ini penting karena manusia dapat menjadi pemicu munculnya peradaban dan kemajuan di dunia. Pembangunan ekonomi dengan kerakyatan atau kekuatan ashabiyah akan memberi dampak terjadinya sinergitas ashabiyah pada bidang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang deskriptif analisis yang diperoleh dari jurnal dan buku dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish yang terkait dengan tema penelitian. Karakteristik pemerintahan di Timur tengah yang berbeda dari bentuk pemerintahan pada umumnya di Eropa, dimana banyak dari negara di Timur tengah yang mendapat legitimasi kekuasaan dari adanya peran besar kelompok kesukuan. Disamping pentingnya konsep ibnu Khaldun ini, adanya relevansi antara politik modern dan kesukuan di Timur tengah yang

dapat mempengaruhi ekonomi politik negaranya. Peneliti menemukan bahwa negara yordania tidak sekuat negara arab lainnya namun dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik ditengah kerentanan akan pengaruh konflik yang berada di sekitar yordania.

**Kata Kunci : Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Ekonomi Politik, Yordania**

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan memiliki pengertian paling sederhana yang termasuk didalamnya yaitu masyarakat dan peradaban yang memiliki dua batasan: kelahiran atau kemerosotan yang mengarah pada ketiadaan. Akibatnya, batas kehidupan memiliki dua titik revolusi yang tidak dapat dilintasi atau berpotongan. Sedangkan menurut tauhid, ada kelanjutan kehidupan abadi setelah kehidupan fana ini. Batasan sederhana ini perlu diberikan batasan yang lebih sederhana lagi, dimana kelahiran dan ketidakberadaan hanyalah batasan untuk merasakan fenomena kehidupan duniawi. Ada garis penghubung antara dua batas kelahiran dan ketiadaan, merupakan perjalanan dan siklus kehidupan, didalamnya juga ada tahap perubahan, dan tahap perkembangan dan penyebaran peradaban, dan disinilah puncaknya titik terjadi. Kelahiran dan kejatuhan peradaban, serta kemunculan dan ketiadaan kehidupan, semuanya merupakan peristiwa yang biasa terjadi dalam sejarah yang ditemui sejarawan ketika meneliti masalah tersebut.

Manusia dapat memicu timbulnya peradaban karena manusia memiliki keyakinan yang mendasar untuk terbentuknya suatu peradaban dan menjadikan dunia yang lebih baik. Inilah yang menyebabkan dalam hubungan antara manusia dan peradaban menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seutuhnya karena keduanya berkaitan dalam terwujudnya suatu kehidupan sesuai kodratnya. Manusia hidup hendaknya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perlu adanya pergerakan lincah yang sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan alam dan seisinya menjadi ladang pergerakan untuk membangun peradaban<sup>1</sup>.

Peradaban merupakan keadaan terjadinya tahapan atau perkembangan kebudayaan dan telah mencapai tingkat tertentu serta mencakup kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun Budaya, di sisi lain, berasal dari keinginan dan hasrat yang lebih murni daripada hubungan praktis dengan masyarakat. Jadi peradaban adalah suatu masa dalam kebudayaan suatu masyarakat ketika telah mencapai suatu kebudayaan tertentu, mengalami kemajuan tertentu, dan dibedakan oleh tingkat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Masyarakat telah

---

<sup>1</sup>Tenny Sudjatnika, *Nillai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia*, Al:Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, Vol,14, No.1 (2017) h.133-146

melihat transformasi sosial yang substansial, dengan tingkat kehidupan yang semakin rumit.

Sejarah Timur Tengah menjelaskan fakta adanya pengaruh dari peran kelompok kesukuan dalam dinamika sosial maupun politik di kawasan ini, yang mana merupakan kawasan yang kaya secara kultural dan kawasan yang tua secara sejarah. Perubahan tatanan masyarakat, ekonomi, serta politik global secara masif, masyarakat timur tengah masih dekat dengan terjadinya tribalisme. Banyak dari negara di Timur tengah yang mendapat legitimasi kekuasaan dari adanya peran besar kelompok kesukuan dan telah terjadi sejak dinasti umayyah hingga sebelum berakhirnya dinasti usmani. Tidak hanya itu, pemimpin kelompok kesukuan juga mengalami transformasi menjadi elit penguasa<sup>2</sup>.

Tidak dapat diingkari, fakta sejarah lain menunjukkan adanya sejumlah kelompok kesukuan yang terbebas dari kekuasaan politik dinasti dan menjalani hidup relative independen. Seperti yang terjadi pada suku bangsa dataran tinggi yaitu pedalaman gurun suriah, Iran, turki, pegunungan dan dataran tinggi di afrika utara. Pada abad ke-19, daerah-daerah tersebut mulai mengalami integrasi dan turut menyesuaikan sistem negara modern yang banyak bermunculan di timur tengah maupun di afrika utara. Namun, sistem dan struktur milik masyarakat kesukuan tidak serta merta hilang dan melebur dalam sistem negara-bangsa tersebut. Tidak sedikit kelompok kesukuan tetap membentuk negara-bangsa tersendiri untuk meraih otonomi seperti etnis kurdi yang berada di Irak dan Turki.

Penguasa dan kelompok kesukuan memiliki hubungan dengan pola relasi kompleks dan dinamis seperti kelompok kesukuan yang bersangkutan paut dengan persoalan negara. Sedangkan di sisi lain, negara tidak dapat melepaskan urusan kesukuan. Dalam sejarah Timur Tengah, negara-negara dan kelompok etnis telah membangun sebuah sistem di mana tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa unsur tribalisme, dan tidak ada kelompok etnis yang dapat hidup tanpa terikat dengan negara.

Tribalisme merupakan istilah atau konsep yang lahir setelah masa kolonialisme. Tribalisme menjadi pusat di sepanjang sejarah wilayah Timur tengah. selain pentingnya dalam memahami politik Timur Tengah, etnisitas sering dianggap sebagai atribut pribadi, dan beberapa antropolog bahkan menyebutnya sebagai DNA Timur Tengah. Etnisitas dipandang sebagai hambatan pra modern untuk pembentukan negara modern dalam keadaan tertentu, atau sebagai kekuatan yang

---

<sup>2</sup>Nawan Yulianto and Muhammad Syauqillah, *Aṣabiyyah Dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibnu Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik Dan Tribalisme Di Timur Tengah*, Meis : Jurnal Middle East and Islamic Studies, vol. 6, no. 1, (2019) h.17-37

mengisi lubang yang ditinggalkannya pada orang lain.

Perdamaian dapat dipelihara dengan sikap netral para pemimpin negara, serta adanya kesadaran untuk menahan persaingan antar suku<sup>3</sup>. Tribalisme dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terciptanya perdamaian maupun stabilitas politik dengan otoritas pusat yang melakukan pembagian kekuasaan dan aliansi yang menguntungkan bagi bersama.

Yordania seringkali tidak memperoleh sorotan yang besar daripada negara-negara tetangga yang berada di kawasan Timur Tengah karena tidak ikut sertanya Yordania dalam kejadian Arab Spring. Dalam hal ini Yordania berada di kondisi stabilisasi politis. Selama lebih dari dua puluh tahun, Yordania telah meraih stabilitas politik. Menilik keadaan timur tengah yang memiliki kesukuan serta berkaitan dengan adanya kekerasan dan ketidakstabilan seperti Suriah dan Irak. Negara yang mampu meraih stabilitas politik di timur tengah tidak hanya dialami oleh Yordania. Selain itu, yordania tidak mengalami konflik yang serius di dalam dinamika kawasan ini<sup>4</sup>. Data krisis ekonomi yang dialami yordania terutama pertumbuhan mengalami stagnasi 2% berdasarkan data kompas.com dan pemerintah yordania memerlukan dana tambahan dari negara luar untuk berinvestasi diperlukan data mendukung berupa data dalam bentuk table terkait ekonomi, stabilitas politik data tidak didukung terutama Dimana Yordania telah berada dibawah kepemimpinan keluarga Bani Hasyimiah yang dapat bertahan selama 4 periode.

Ibnu Khaldun melihat adanya perkembangan sejarah khususnya yang terjadi pada manusia yang menggarisbawahi adanya proses, interaksi yang terjalin antar manusia, dan implikasi dari interaksi tersebut yang sebagian besarnya terjadi dalam kelompok-kelompok. Mempelajari Al-qur'an memberi banyak ilham bagi Ibnu Khaldun dalam konsep kemanusiaan yang digagasnya . Konsep kemanusiaan ini banyak Hakikat manusia serta masyarakat dalam pemikiran Ibnu Khaldun dijelaskan dalam tiga pengertian. Yang pertama, Karena manusia merupakan makhluk politik yang memerlukan organisasi sosial, manusia harus dimasukkan ke dalam pengorganisasian masyarakat. Al-Umran merupakan penamaan bagi organisasi masyarakat ini. Yang kedua, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi manusia yang dapat berimplikasi pada perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan, produk kerajinan, bahkan bentuk mata pencaharian. Dari sini ibnu Khaldun mengelompokkan

---

<sup>3</sup> Gaceem, Rajaa, *Tribes and States in the Middle East*, Student Repository Leiden University (2019)

<sup>4</sup> Nizzah Amalia Subchan, *Faktor Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordnia Dengan Qatar : Analisis Dinamika Keamanan Kawasan Dan Identitas Nasional*, Indonesian Journal of International Relations, vol. 4, no. 1, (2020) p. 25–41,

masyarakat dalam dua bentuk: yang pertama nomaden atau masyarakat badui dan yang kedua yaitu masyarakat menetap dapat disebut dengan masyarakat kota/hadharah. Pada era Abbasiyah konteks sosio-historis banyak berpengaruh pada pemikiran Ibnu Khaldun khususnya keadaan stagnansi mengkaji hadis saja yang perlu dikritisi karena hakikatnya karakter manusia selalu mengalami perubahan<sup>5</sup>. Penelitian ini melakukan evaluasi dan menganalisis konsep ashabiyah dengan hubungannya dalam isu ekonomi maupun politik yang terjadi di Yordania, pasca pandemic covid 19 Yordania mengalami kontraksi yang hebat dalam sejarah krisis ekonomi terutama. Topik ini penting karena manusia dapat menjadi pemicu munculnya peradaban dan kemajuan di dunia. Pembangunan ekonomi dengan kerakyatan atau kekuatan ashabiyah akan memberi dampak terjadinya sinergitas ashabiyah pada bidang lainnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan proses pemahaman dan penelitian pada fenomena politik dan ekonomi di Yordania. Dimana Yordania telah berada dibawah kepemimpinan keluarga Bani Hasyimiah yang dapat bertahan selama 4 periode. Metode penelitian deskriptif analisis digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memahami relevansi konsep ashabiyah dengan isu ekonomi dan politik di yordania.

Penelitian ini termasuk pada klasifikasi penelitian melalui kepustakaan atau *library research*, dimana penulis meneliti serta menjelaskan hubungan antara konsep ashabiyah Ibnu Khaldun dengan keadaan ekonomi politik. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui buku referensi, laporan, jurnal, dan media lain yang berhubungan dengan subjek penelitian, menggunakan aplikasi publish or perish. Data dan informasi diperoleh merupakan data tersier yang diperoleh melalui internet-based research atau metode berbasis internet.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ashabiyah Ibnu Khaldun**

*Ashaba* merupakan kata dasar dari Ashabiyah, secara etimologis memiliki arti mengikat.

---

<sup>5</sup>Ardaninggar Luhtitianti and Achmad Zainal Arifin, *Applying Ibn Khaldun Theory Into The Islamic Preaching Movement in The Period of Demak Empire: Reflection for the Contemporary Muslim Society*, RELIGIA Jurnal-Jurnal Keislaman, Vol.24 No.1 (2021) p. 1–21,

Pengertian Ashabiyah secara fungsional merujuk pada ikatan sosial budaya, dimana ashabiyah dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan dari suatu kelompok sosial. Selain itu, dengan menitikberatkan pada kesadaran, kohesi dan kesatuan kelompok, ashabiyah juga dipahami sebagai solidaritas sosial. Dalam bukunya Ibnu Khaldun yang berjudul ‘Muqaddimah’ , ashabiyah berpengaruh besar pada penentuan kemenangan dan kelangsungan hidup pada suatu dinasti, kerajaan maupun negara. Ketidakhadiran ashabiyah pada suatu negara maka eksistensi dan keberlangsungan negara akan sulit terwujud karena negara akan terancam oleh disintegrasi dan kehancuran<sup>6</sup>.

Ibnu khaldun memberikan pengertian mengenai ashabiyah dalam pemaknaan negatif dan positif. Pemaknaan ashabiyah dipandang positif karena merujuk pada konsep persaudaraan untuk membentuk solidaritas sosial, saling bekerjasama, memenuhi kewajiban sesama dan mengekang kepentingan pribadi. Sehingga, dari wujud persaudaraan ini akan mendukung kesamaan sosial serta menjadi kekuatan yang menentukan kebangkitan maupun kemajuan dalam suatu peradaban<sup>7</sup>. Sedangkan ashabiyah dalam pemaknaan negatif karena memicu kesetiaan bahkan fanatisme membuta yang tidak didasari aspek kebenaran. Pada aspek inilah sistem pemerintahan islam tidak menghendaki pengertian ini.

Ibnu Khaldun mendasarkan manusia memerlukan institusi suatu negara pada hakikatnya pada dua hal: Pertama, memastikan bahwa individu-individu hidup berdampingan, damai, tenang, dan kooperatif saling melengkapi satu sama lain guna menciptakan bentuk-bentuk budaya yang berbeda untuk menopang kehidupannya. Kedua, melindungi diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar<sup>8</sup>. Oleh karena itu, Ashabiyah dapat menjadi penting bagi suatu negara. Teori pembentukan negara dengan realitas kesukuan, Ibnu khaldun berpendapat manusia tidak mungkin menjalankan suatu negara tanpa memperoleh dukungan persatuan dan solidaritas yang kuat. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Khaldun, sewajarnya tidak dapat diduga suatu negara dapat bertahan lebih dari tiga generasi. Dimana setiap generasinya dapat berumur lebih lama atau terkadang lebih pendek, hal ini turut dipengaruhi oleh seberapa kuat dan berapa lama unsur ashabiyah dapat bertahan.

---

<sup>6</sup> Ilham, Muh, *Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Politik Profetik, vol. 4, no. 1 (2016)

<sup>7</sup> Hartanto, *Tinjauan Konstruktivisme Dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa*, Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam, vol. 16, No.2 (2020) p. 49–60,

<sup>8</sup>H. Samsul Nizar, *Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi, vol. 2, no. 1 (2003)

Seiring perkembangan zaman, pertalian pada ashabiyah tidak hanya didasarkan pada keturunan melainkan dapat melalui hubungan antar individu, hubungan profesi, hubungan usaha dan kerja, serta hubungan paham dan ideologi. Menurut Ibnu Khaldun, kegiatan seperti ini merupakan proses sesuai dengan watak alamiah manusia dengan kecenderungan bermasyarakat dimana ia akan mendapatkan keuntungan lahir dan batin. Ashabiyah masih menjadi faktor yang mendasar bagi kelanjutan atau perkembangan suatu negara. Luas dan besarnya<sup>9</sup> suatu negara dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan pendukungnya, maka tanpa adanya ashabiyah suatu negara tidak dapat berdiri. Dalam analisis Ibnu Khaldun, Ashabiyah turut dipengaruhi oleh beberapa variabel yang membentuk hubungan sebab-akibat sirkular. Ashabiyah dapat mengalami perkembangan dan semakin kuat jika didalamnya terwujudnya keadilan untuk memastikan tercukupinya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui kewajiban mutual yang terpenuhi serta hasil pembangunan yang terbagi secara merata. Keadilan yang tidak terwujud maka tidak akan menimbulkan kehadiran ashabiyah yang pada gilirannya otoritas politik dapat melemah dan berjalan tidak efektif. Hal ini direfleksikan pada pelemahan seluruh variabel utama pada sosial ekonomi dan dapat membawa pada kerusakan bahkan kehancuran peradaban<sup>10</sup>. Dapat dikatakan bahwa ashabiyah tidak hanya terjadi pada hubungan yang memiliki pertalian darah serta bukan merupakan suatu hal yang memiliki wujud maupun konkrit. Hal ini dikarenakan, ashabiyah merupakan kelompok, terlepas dari ada tidaknya hubungan darah namun memiliki tujuan yang sama dan akan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan tujuan yang telah disepakati.

Untuk memerangi kemerosotan ekonomi saat ini, teori ekonomi Ibnu Khaldun menyerukan penurunan pajak dan peningkatan ekspor pemerintah. Pasar terbesar untuk pendapatan adalah pemerintah. Wajar jika pasar lain mengalami penurunan jika pasar pemerintah mengalami penurunan. Yang pertama harus nilai, diikuti oleh pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, ekonomi makro dari pajak dan pengeluaran publik, siklus, perdagangan, pertanian, industri, dan perdagangan, serta hak atas kemakmuran, adalah pokok-pokok pembahasan ekonomi Ibnu Khaldun.

Teori unik milik Ibnu Khaldun yaitu circle of equity yang membahas mengenai beberapa

---

<sup>9</sup> Dalam hal ini dapat dipahami sebagai kemajuan

<sup>10</sup> Hartanto, *Tinjauan Konstruktivisme Dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa*, Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam, vol. 16, No.2 (2020) p. 49–60,

instrumen yang saling mempengaruhi dan berhubungan dalam memajukan peradaban atau bahkan dapat membuat peradaban mengalami kemunduran. Instrumen dalam teori circle of equity milik Ibnu Khaldun diantaranya adalah syariah, harta, otoritas politik atau pemerintahan, benda atau kekayaan, manusia, pembangunan dan keadilan<sup>11</sup>. Nilai syariah sebagai salah satu instrumen dari circle of equality, terdapat beberapa aspek seperti akhlak, ibadah, dan muamalah dimana pelaksanaan dan kajian yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jika keadaan ekonomi masyarakat yang mengalami peningkatan serta diiringi dengan kesadaran terhadap syariah, akhlak dan etika yang baik dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat keseluruhan<sup>12</sup>. Anjuran syariat akan mudah dilakukan bagi masyarakat yang sejahtera dalam melaksanakannya seperti melaksanakan infaq, zakat, sedekah, dan wakaf sehingga keadilan ekonomi dan keseimbangan dapat terwujud. Terwujudnya keadilan karena masyarakat yang memiliki harta yang berlimpah akan menggunakan hartanya untuk ibadah termasuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

### **Relevansi Ashabiyah dalam Membangun Kemakmuran Ekonomi di Yordania**

Ibnu khaldun dalam pemikirannya mengenai ashabiyah di bidang ekonomi, penyelesaian yang dapat digunakan sebagai obat resesi ekonomi yaitu dengan mendorong peningkatan kegiatan ekspor pemerintah dan melakukan pengecilan pajak. Hal ini karena, pasar terbesar adalah yang dapat memberikan pengaruh pada pendapatan dan penerimaan, jika mengalami penurunan maka pasar lain juga berpotensi untuk turut serta mengalami penurunan.

Ibnu khaldun menyebutkan poin pokok dalam konsep ekonominya berupa: nilai, sistem harga, pembagian kerja, uang, hukum permintaan dan penawaran, pembentukan modal, kegiatan produksi dan konsumsi, kegiatan ekonomi makro yang berasal dari perpajakan dan belanja publik, pertanian, industri dan daur perdagangan, hak kemakmuran dan pertumbuhan penduduk. Dari konsep ini, pembangunan ekonomi dengan kerakyatan atau kekuatan ashabiyah akan memberi dampak terjadinya sinergitas ashabiyah pada bidang lain-lain. Namun, peran negara

---

<sup>11</sup> Anantasena Indra dan Siti Inayatul, *Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.7, No.11, p 2193

<sup>12</sup> Ibid, p. 2195



harus sentral untuk dapat membangun sektor ashabiyah serta untuk menguatkan sendi kehidupan dengan tingginya nilai filosofis<sup>13</sup>.

Ibnu Khaldun menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh sektor penting seperti pertanian, industri dan perdagangan (Beik, 2008). Selain itu, Ibnu khaldun juga menjelaskan pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan pada komunitas kota dan desa. Pertama, ekonomi dengan basis badawah atau komunitas desa/tradisional dengan didukung basis pertanian sebagai sarana produksi. Kedua, ekonomi dengan basis hadharah atau komunitas modern/kota yang melakukan kerjasama untuk melancarkan bisnis yang dijalani. Kegiatan yang lazim dilakukan pada ekonomi perkotaan adalah perdagangan yang dapat terjadi dengan adanya hasil pertanian, dan perindustrian yang lebih kompleks. Jika di suatu kota memiliki keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, serta adanya peningkatan dari keduanya menandakan kota yang mengalami perkembangan. Ketiga, Ekonomi berbasis pemerintah atau negara dimana perniagaan, perkebunan maupun pertanian di kalangan penduduk kota memerlukan wibawa dan proteksi. Dimana dalam hubungan ini diindikasikan adanya permusuhan atau persaingan antara rakyat dengan para amir atau raja. Keempat, Kerjasama antar komunitas ekonomi seperti tolong menolong untuk menghasilkan makanan dalam waktu yang cukup dan jumlah yang lebih banyak.

Kemampuan ekonomi Yordania tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan negara arab lainnya. Diantaranya karena sumber daya alam yang dimiliki Yordania sedikit dan tidak memungkinkan kesamaan Yordania dalam hal kekayaan minyak dengan negara tetangga sebagai basis perekonomian negara. Secara politis, Yordania memiliki kerentanan selain dari miskinnya sumber daya alam, juga karena basis perekonomian yang berorientasi pada eksternal. Selain itu, pendapatan yang terbatas dapat mempengaruhi pada perpolitikan nasional di Yordania<sup>14</sup>.

Yordania yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Hashemite merupakan negara berkembang dengan model ekonomi yang terbuka dan memiliki kerentanan baik pengaruh makro maupun mikro. Masalah yang turut mempengaruhi ekonomi Yordania diantaranya adalah yordania bukan negara industri, lebih banyak tingkat impor dibandingkan ekspor, defisit anggaran karena pengeluaran total diatas pendapatan publik hingga mengharuskan untuk

---

<sup>13</sup> Khoiruddin, *Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, vol. 8, No.1 (2016)

<sup>14</sup> Muhammad Izzu, *Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan "Solusi Dua Negara" Dalam Konflik Israel-Palestina*, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2020)

mengambil utang publik, tingkat pengangguran tinggi, pajak yang meningkat secara konstan dan ketergantungan akan bantuan asing dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak. Dimana sebagian dari bantuan asing dibutuhkan untuk kebutuhan menampung pengungsi dan ketergantungan ini akan membuat sulit untuk mempertahankan kemerdekaan.

Namun, dengan keberadaan Yordania yang berdekatan dengan konflik ketegangan antara Palestina dengan Israel menambah tantangan bagi perekonomian Yordania. Tidak sedikit pengungsi yang berasal dari Palestina menempati Yordania, dengan kemampuan yordania untuk pembiayaan pengungsi yang kurang karena ketidakseimbangan sumber daya dan populasinya. Keberadaan pengungsi di yordania membawa manfaat perkembangan ekonomi karena bantuan pembangunan yang berasal dari masyarakat internasional untuk memberikan bantuan bagi pengungsi. Terlepas dari adanya bantuan pendanaan, seiring dengan perubahan demografi membawa yordania tetap memiliki tanggung jawab berkepanjangan untuk mengeluarkan biaya. Hal ini diperparah dengan adanya penyetoran dana terhadap UNRWA yang juga nampak keputusan yang sama pada agensi pengungsi lainnya seperti UNHCR dan WFP (World Food Programme). Sehingga mengharuskan Yordania untuk bergantung pada pinjaman luar negeri sebagai strategi utang baru Yordania.

Adapun yordania sempat mengalami krisis keuangan global di tahun 2008 yang cukup memberi guncangan pada fondasi ekonomi Yordania serta penurunan investasi langsung asing dan aliran modal swasta. Selain itu, kondisi rasio utang luar negeri Yordania mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan adanya kebijakan dari Menteri Yordania pada Mei 2018, yang menyebutkan mengenai langkah penghematan yang drastis. Justru mengundang protes yang cukup besar dari publik dengan tuntutan untuk membatalkan kenaikan pajak penghasilan dan memangkas subsidi untuk bahan bakar, listrik, dan makanan<sup>15</sup>. Searah dengan protes yang dilakukan publik, teori ekonomi Ibnu Khaldun menyarankan pengecilan pajak serta meningkatkan ekspor sebagai solusi dalam ekonomi yang lesu.

Disisi lain, kemampuan geopolitik Yordania membawa peluang Kerjasama seperti negara Iran yang memasok minyak dengan harga murah dan pasar Irak dapat memperoleh surplus makanan, industri ringan dan barang rumah yang berasal dari Yordania. Sementara pasar Suriah dapat memasok pakaian dan makanan dengan harga murah pada pasar Yordania yang dapat

---

<sup>15</sup> Nizzah Amalia Subchan, *Faktor Normalisasi Hubungan Diplomati Yordania Dengan Qatar : Analisis Dinamika Keamanan Kawasan Dan Identitas Nasional*, Indonesian Journal of International Relations, vol. 4, no. 1, (2020) p. 25–41,

membantu tekanan anggaran Yordania. Maka pemutusan hubungan perdagangan antara tiga negara perlu untuk dibuka Kembali. Terlepas dari hambatan yang berakibat pada perekonomian Yordania, aspek lain menunjukkan Yordania memiliki stabilitas politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi dengan nilai tukar yang tetap. Meskipun negara-negara tetangga berada pada ketegangan geopolitik<sup>16</sup>.

Ekonomi Yordania memiliki percampuran antara sektor pemerintahan dengan sektor swasta yang berperan besar pada perekonomian negaranya. Semula, kegiatan ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh swasta, setelah tahun 1950 pemerintah mulai memiliki peran yang meningkat untuk turut andil dalam perekonomian Yordania. Ekonomi Yordania dalam perspektif ekonom dinilai sebagai ekonomi berukuran kecil yang bermakna bahwa hubungan komersial antara Yordania dengan seluruh dunia sebagai harga pengambil perdagangan luar negeri impor dan ekspor. Akibatnya pilihan bagi yordania adalah untuk mengikuti ekonomi baik regional maupun internasional untuk pencapaian tujuan pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar yang mencerminkan fluktuasi pada pasar regional dan internasional. Yordania memiliki kelebihan tenaga kerja yang terampil, yang memungkinkan menyumbang pendapatan yang besar pada pemerintahan hasimite. Dalam hal ini pendapatan besar melalui pengiriman uang asing yang akan dikirim kepada keluarga di negara asal yang mengangkat 25% dari PDB Yordania. Ditambah dengan Yordania yang semakin meningkatkan hubungan perdagangan bebas atau dapat dikenali dengan Free Trade Agreements, yang dijalin oleh negara-negara seperti: Canada, Singapore, Eropa, Malaysia, Libya, Algeria, Tunisia, Syria, Amerika Serikat, dan Turki.

Pengelolaan perekonomian Yordania dinilai baik yang nampak dari pertumbuhan ekonomi di negaranya yang mengalami kenaikan GNP perkapita mencapai 6% setiap tahunnya. Di tahun 2018, GNP Yordania memperoleh \$42.291 milyar. Sedangkan penduduknya juga mengalami kenaikan sekitar 3,5%. Disamping keadaan negara Yordania yang miskin akan bahan tambang, bahkan untuk minyak memerlukan impor dari negara lain. Pertumbuhan ekonomi di Yordania dapat diraih melalui hasil pertanian seperti padi, buah zaitun, buah-buahan, dan sayuran maupun sumber alam lainnya seperti garam, fosfat. Selain itu terdapat perkembangan dalam mengolah

---

<sup>16</sup> Afeef, N. A., Savenkova, E. V., & Bystryakov, A. Y, *Economy of Jordan: obstacles and prospects of progress of a developing economy*, Proceedings of the International conference "Economy in the modern world" (ICEMW 2018)

bahan tambang lain seperti tekstil, semen, dan plastik<sup>17</sup>.

Disamping tujuan negara untuk memberdayakan ekonomi negara, didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya secara adil dan makmur. Wakaf sebagai salah satu bidang yang dapat membantu untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai lembaga untuk pemecahan masalah terkait ketidakadilan sosial. Pengelolaan wakaf yang baik dapat berpotensi besar pada ekonomi. Maju mundurnya wakaf turut dipengaruhi oleh baik atau buruknya pengelolaan manajemen wakaf. Yordania sebagai salah satu negara muslim yang menggunakan wakaf pada perbendaharaan negaranya. Dimana penanganan wakaf dikelola secara langsung oleh kementerian wakaf dan Urusan Agama, dengan didasarkan pada Undang-undang negaranya.

Pengelolaan wakaf di Yordania menunjukkan keproduktifannya dalam mengelola secara baik aset wakaf berupa uang maupun wakaf tanah. Yordania mengkolaborasikan pengelolaan wakaf uang dengan wakaf tanah maupun properti. Dari pengelolaan inilah akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan perumahan penduduk, pembangunan perumahan petani dan mengembangkan tanah pertanian, serta membangun tempat suci di daerah selatan. Selain itu, kementerian wakaf juga melakukan produktivitas aset wakaf dengan salah satunya mengembangkan hasil harta wakaf tersebut. Disamping kegiatan memelihara dan membangun tempat ibadah, wakaf di Yordania bertujuan untuk memajukan pendidikan, mendorong semangat jihad, semangat dan moralitas islam<sup>18</sup>.

Menurut Ibnu Khaldun aktivitas ekonomi, luasnya pasar, jumlah tenaga kerja maupun pembagian tenaga kerja, fasilitas, tunjangan, dan peralatan yang disediakan negara turut mempengaruhi kesejahteraan dan peningkatan pembangunan pada suatu negara. Semakin intensif aktivitas yang dilakukan menandakan negara semakin besar yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tabungan negara hingga terwujudnya pembangunan dan upaya kesejahteraan. Kesejahteraan dan pendapatan yang meningkat memerlukan masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Dimana solidaritas diantara masyarakat diperlukan untuk kerjasama yang semakin meningkat pula<sup>19</sup>. Kerjasama meningkat, produktivitas meningkat. Solidaritas

---

<sup>17</sup> Nathania Cevlin Gloria Malau, *Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Yordania Pada Pemilihan Umum Tahun 2016*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2020)

<sup>18</sup> Afrianti Wahyuni, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Yordania dan Turki*, dalam <https://osf.io/srz2c/> Diakses pada 5 Juli (2022)

<sup>19</sup>Yosi Aryanti, *Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi*

dalam hal ini dapat berupa Ashabiyah, akan semakin kuat jika terwujudnya keadilan.

### **Relevansi Ashabiyah Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik di Yordania**

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pembentukan negara memiliki keterikatan dari peran ashabiyah karena tanpa masyarakat, suatu negara atau penguasa tidak dapat bertumbuh besar atau berkembang. Serta, masyarakat tidak dapat menegakkan negara jika tidak terdapat dukungan yang kuat pada persatuan maupun solidaritas dari umatnya. Seperti di masa kepemimpinan Nabi SAW, Islam ditempatkan dengan konsep ashabiyah yang bermanfaat untuk melindungi berbagai kabilah yang ada di Arab supaya dapat terhindar dari konflik ketidakadilan sosial maupun konflik perpolitikan<sup>20</sup>. Masyarakat Arab Badui menampilkan kekuatan Ashabiyah yang kuat yang juga dapat menguatkan seseorang dalam kerasnya kehidupan gurun. Sehingga ashabiyah dapat berfungsi sebagai pemberian proteksi (al-himayah), dorongan saling membela (al-mudafa'ah), kekuatan penekanan (al-mutalabah) maupun aktivitas sosial lain. Selain itu, dari pemaknaan ashabiyah memiliki dua sifat yang berbeda yaitu positif dan negatif. Dalam pemaknaan yang bersifat positif ashabiyah dapat semakin menguatkan ketuhanan bahkan kemajuan bagi suatu negara atau pemerintahan. Sebaliknya, ashabiyah dapat bersifat negatif apabila rasa persaudaraan menjadi suatu kesetiaan atau kefanatikan buta terhadap suatu ideologi atau pada suatu kelompok tertentu. Seperti pada studi kasus keruntuhan Uni Soviet. Jika dilihat dari konsep ashabiyah keruntuhan dapat terjadi karena eksklusivisme pada satu Partai yaitu komunis yang mendatangkan ashabiyah yang bersifat negatif di dalam rezim yang otoriter. Filsafat yang berasal dari Karl Marx dapat terus relevan di Uni Soviet, namun karena pelarangan diskusi terhadapnya justru membawa keruntuhan<sup>21</sup>. Oleh karena itu, konsep ashabiyah yang tertanam pada suatu masyarakat dapat membawa kebaikan jika tidak menimbulkan kefanatikan buta yang dapat mencegah terjadinya ashabiyah secara positif dengan kewajiban untuk mendorong keselarasan dapat terpenuhi.

Mayoritas negara-negara di Timur Tengah menganut sistem politik yang belum demokratis

---

*Dan Politik*, Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, vol. 2, no. 2 (2018)

<sup>20</sup>Muhammad Yusrul Hana, *Perubahan Sosial Masyarakat Di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah Dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad*, Al-Izzah : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 15, No. 2 (2020) p.115-128

<sup>21</sup> Emil Dwi, Susanto dan Sri Kusumo, *Runtuhnya Marxisme-Leninisme Di Uni Soviet Dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun*, Jurnal Filsafat, Vol.31, No.1 (2021) p.85-98

atau bahkan tidak demokratis. Yordania merupakan negara dengan bentuk negara monarki dengan perdana menteri yang memiliki otoritas di bawah raja. Seperti pada kegiatan rekrutmen perpolitikan yordania dimana raja memiliki otoritas yang sangat kuat. Hal yang sama pun terjadi pada proses pemilihan keanggotaan parlemen, yang dapat melalui pemilihan dan melalui penunjukan dari raja. Namun, seiring berjalannya waktu otokrasi di Yordania saat ini perlahan mengalami modernisasi, dengan semakin bergerak ke arah kebebasan yang lebih besar. Di Yordania diadakannya pemilihan umum sebagai salah satu tanda liberalisasi yang mulai memasuki negara ini, dimana pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari proses politiknya sebagai negara dengan bentuk monarki konstitusional. Selain itu, mulai adanya keterwakilan perempuan di parlemen sebagai salah satu prasyarat pembangunan serta transisi menuju demokrasi.

Di sisi lain, Yordania tidak menerima demokratisasi yang dicurigai sebagai alat penguasaan kekayaan Timur Tengah berupa sumber daya minyak. Selain itu, upaya demokratisasi yang dilakukan Amerika Serikat lebih nampak sebagai penggiringan negara arab dengan kekayaan minyaknya agar memiliki ketergantungan pada AS dan merupakan bentuk lain dari intervensi yang dilakukan AS pada negara lain untuk memelihara kedudukan AS sebagai hegemoni di dunia internasional<sup>22</sup>.

Timur Tengah memiliki istilah negara dan suku sebagai entitas sosialnya, yang mana relasi antar entitas sosial ini diisi dinamika yang kompleks. Negara menjadi entitas sosial yang mendominasi pada kawasan timur tengah, disisi lain struktur atau sistem kesukuan tetap bertahan dan berlangsung. Dalam hal ini, Ashabiyah bermula sebagai faktor psikologis akan mendorong kelompok dari individu-individu untuk bergerak secara kolektif. Kemudian kelompok tersebut akan terdorong untuk meraih kondisi sosial-politik yang lebih baik dari yang telah mereka alami. Seiring perkembangannya, ashabiyah menjadi hasil dari kedekatan yang muncul dengan adanya kesulitan kondisi berada di luar lingkaran kekuasaan.

Negara bangsa kerap kali dihadapkan dengan adanya suku bangsa. Bahkan, terdapat pada beberapa negara beranggapan bahwa kelompok kesukuan sebagai lawan bagi negaranya. Dalam pengertian ideal, suku bangsa merupakan kelompok sosial dengan mendasarkan kekerabatan, garis keturunan atau ikatan darah. Sedangkan Negara bermakna sebagai struktur yang melakukan

---

<sup>22</sup>Muhammad Turhan Yani, *Wacana Pemerintahan Demokratis Dan Dinamika Politik Di Negeri-Negeri Timur Tengah: Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, Dan Turki*, Islamica : Jurnal Studi Keislaman, Vol.1, No.2 (2007)

monopoli kekuasaan pada teritori tertentu. Dalam hal ini, keadaan modern negara memerlukan loyalitas kompleks tidak hanya ikatan kekerabatan suku atau etnis melainkan solidaritas negara yang dibangun atas motivasi kerjasama berbagai etnis, kelompok politik, birokrasi dan politik.

Keadaan tersebut berbeda dengan realita sosial politik yang terjadi di Timur Tengah. Model negara di Timur tengah berbeda dengan negara-negara di Eropa, baik pada fungsi atau strukturnya. Legitimasi negara maupun kedaulatan wilayah di Timur Tengah dapat dipahami secara parsial karena adanya kelompok atau kekuatan regional dalam negara maupun internasional yang dapat memberi batasan pada kemampuan negara. Negarapun dipahami sebagai salah satu bagian dari keseluruhan organisasi sosial di Timur tengah. Negara memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum, memerintah, mobilitas sosial, mengakomodasi pluralitas dan representasi politik. Dimana kemampuan ini berubah seiring waktu, serta memaksa tidak sedikit dari negara-negara di Timur Tengah untuk mengakomodasi kelompok kesukuan dalam partisipasi politik dan proses integrasi sosial. Hubungan negara dengan kelompok kesukuan ini membentuk relasi simbiotik yang sesekali bersifat dialektis.

Islam memiliki pengaruh yang besar dalam budaya pada masyarakat Yordania, bukan hanya sebagai agama besar bahkan dalam hal pemerintahan. Seperti negara lain di Timur Tengah yang merupakan negara muslim menjadikan nilai-nilai didalam agama islam sebagai sumber hukum negara. Yordania dapat menunjukkan relasi antara negara dengan suku bangsa dalam proses transformasinya menuju negara-bangsa yang modern. Banyak negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki ketergantungan pada elit ataupun kultur perkotaan. Hal ini berbeda dengan kekuasaan pada masa kerajaan Hasyimiyah Yordania tatanan politik maupun legitimasi kekuasaan yang secara eksplisit telah mengakomodasi tribalisme. kekuasaan kerajaan yang terbentuk dapat dimanfaatkan bagi kelompok kesukuan untuk turut serta mengintegrasikan diri pada sistem negara yang modern dengan mempertahankan budaya primordial. Maka keberhasilan pada proses transformasi dapat diraih, berjalan relatif mulus dengan kekerasan pada jumlah yang minim, serta menjadi alasan terciptanya stabilitas politik(Gacem, 2019).

Arab revolt atau peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan yang dilakukan kelompok etnis arab dengan dipimpin Syarif hussein kepada kekuasaan dinasti di tahun 1916. Dimana peristiwa ini sebagai langkah awal konsolidasi kelompok bani hasyim yang menegaskan terhadap klaim keturunan Quraisy atau klan Nabi Muhammad. Kelompok Bani Hasyim juga melakukan aliansi pada konfederasi kesukuan terbesar dan berpengaruh yang dipegang oleh Bani

Sakhr. Kontribusi dari kelompok kesukuan telah nampak sejak masa awal perkembangan transformasi Yordania menuju negara-bangsa. Sejak Kolonial Inggris, yang menerapkan sistem kolonial untuk meraih kepentingannya dengan memberlakukan budaya dalam tradisi politik liberal dan secara hati-hati diterapkan di tengah masyarakat kesukuan. Terlepas dari adanya perubahan maupun evolusi yang terjadi, masyarakat kesukuan pada Timur tengah mempertahankan apa yang diistilahkan sebagai “state of mind”.

Keberhasilan kemampuan otoritas negara dengan mengintegrasikan suku bangsa pada struktur negara modern dapat dilihat pada eksperimen Yordania yang membuktikan kelompok kesukuan dapat membebaskan negara dari berbagai krisis. Krisis politik Yordania yang mendapatkan andil besar dari kelompok kesukuan yaitu : integrasi wilayah tepi barat setelah perang arab-israel berakhir, pembunuhan Raja Abdullah I, Gejolak *Arab Spring* 2011. Pada peristiwa-peristiwa tersebut dapat mempertahankan kekuasaan Bani Hasyim dengan Dukungan kesukuan dan ashabiyah hingga hari ini Dinasti Hasyimiyah telah bertahan selama empat generasi<sup>23</sup>. Reformasi politik yang dilakukan sejak 2010 yang diiringi dengan tantangan internal maupun eksternal seperti terjadinya Arab spring dimulai dari Tunisia hingga ke negara arab lainnya. Rezim kerajaan seperti pada Yordania dan Maroko dapat diterima oleh warga dengan tidak adanya pertumpahan darah serta mendasarkan legitimasi atas sejarah, agama dan suku, fleksibilitas dan solusi keamanan dalam menghadapi tuntutan dari rakyat. Baik melalui reformasi politik maupun pemberian imbalan berupa uang untuk memberikan ketenangan pada rakyatnya. Pada tahun 2011, rakyat Yordania memulai gerakan untuk menyerukan sejumlah reformasi politik, ekonomi dan sosial serta melawan korupsi, dan slogan yang menuntut reformasi konstitusi untuk kembali pada konstitusi 1952. Tujuan dari reformasi ke konstitusi 1952 adalah sebagai upaya memperkuat peran dewan perwakilan rakyat dengan memisahkan kekuasaan dan mencegah eksekutif memiliki otoritas pada legislatif dan yudikatif. Hingga akhirnya tuntutan reformasi meningkat menjadi penerapan monarki konstitusional dengan dasar penyesuaian konstitusi 1952 pada rezim Yordania. Reformasi politik dan konstitusi diselesaikan pada tahun 2011 dan 2012, Yordania melakukan adopsi pendekatan secara bertahap<sup>24</sup>.

Sejak berdirinya emirat di tahun 1921, Yordania telah mengupayakan stabilitas relatifnya

---

<sup>23</sup> Nawan Yulianto and Muhammad Syauqillah, *Ashabiyyah Dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibnu Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik Dan Tribalisme Di Timur Tengah*, Meis : Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol. 6, No. 1, (2019) p.17-37

<sup>24</sup> Aref Hamad, *The Impact of Political Reforms on Stability in Jordan: (2011-2018)*, Open Journal of Political Science, Vol,9, No.1 (2019) p. 133-136



serta menampakkan ketahanan yang besar sebagai suatu entitas politik meski berada di wilayah yang banyak terjadi konflik dan tidak stabil. Stabilitas internal politik dipengaruhi pula oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Diantara faktor internal yang berkontribusi di dalamnya yaitu :

1. Legitimasi antara agama dan sejarah dalam kepemimpinan hashemite
2. Struktur dan lembaga konstitusional dan hukum hadir dalam pemerintahannya
3. Adaptasi tinggi pada politik rezim serta pelaksanaan reformasi politik yang dilakukan secara bertahap sejak kemunculannya sebagai negara
4. Lembaga militer dan keamanan, sentralitas sistem politik selama kritis yang dipadukan dengan baik
5. Keadaan sosial yang harmoni
6. Kesadaran politik yang meningkat di kalangan warga

Sedangkan dari faktor eksternal yang turut mempengaruhi stabilitas di Yordania dimulai sejak pendirian emirat yang memicu adanya dukungan politik, militer dan ekonomi Inggris. Selain itu, Kepemimpinan Yordania berhasil mendapatkan keyakinan dari pihak eksternal lain bahwa stabilitas Yordania dan kelangsungan hidupnya merupakan kebutuhan bagi keamanan regional.

Kekuasaan Bani Hasyim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berjalannya politik di Yordania. Dimana Bani Hasyim memiliki faktor ashabiyah berupa hubungan persaudaraan yang kuat yang mendukungnya. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, mengontrol kepentingan pribadi dengan mendahulukan pemenuhan kewajiban sehingga keharmonisan dan kemajuan dalam pembangunan dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa peradaban manusia dapat terjadi dalam satu komunitas dengan komunitas lainnya melakukan gotong royong dan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terjadi dalam interaksi sosial. Salah satu upaya dalam menaikkan kemampuan ekonomi masyarakat yordania yaitu dengan pengelolaan wakaf yang baik, pengelolaan dari kemampuan geopolitik yordania, dan masih banyak lagi yang dapat memicu peningkatan kerjasama dan produktivitas pada gilirannya akan mewujudkan keadilan. Dengan teori *circle of equality* Ibnu khaldun dapat dilihat keterkaitan antara ekonomi dengan politik. Peningkatan ekonomi akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perintah dalam syariah karena masyarakat yang sejahtera dapat memenuhi kewajiban syariah seperti berzakat maupun

bersedekah. Dimana dari sedekah yang dilakukan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan syariat seperti infaq, zakat, sedekah, dan wakaf dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Sejarah Timur Tengah menjelaskan fakta adanya pengaruh dari peran kelompok kesukuan dalam dinamika sosial maupun politik di kawasan ini, yang mana merupakan kawasan yang kaya secara kultural dan kawasan yang tua secara sejarah. Ibnu Khaldun melihat adanya perkembangan sejarah khususnya yang terjadi pada manusia yang menggarisbawahi adanya proses, interaksi yang terjalin antar manusia, dan implikasi dari interaksi tersebut yang sebagian besarnya terjadi dalam kelompok-kelompok. Ibnu khaldun dalam pemikirannya mengenai ashabiyah di bidang ekonomi, penyelesaian yang dapat digunakan sebagai obat resesi ekonomi yaitu dengan mendorong peningkatan kegiatan ekspor pemerintah dan melakukan pengecilan pajak. Kemampuan ekonomi Yordania tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan negara arab lainnya. Diantaranya karena sumber daya alam yang dimiliki Yordania sedikit dan tidak memungkinkan kesamaan Yordania dalam hal kekayaan minyak dengan negara tetangga sebagai basis perekonomian negara. Namun, dengan kemampuan geopolitik Yordania memberikan peluang pada kerjasama dengan negara Iran maupun Irak terlepas dari adanya hambatan, Yordania dapat menunjukkan kestabilan pada aspek lain dengan nilai pertambahan nilai tukar yang baik. Disamping banyaknya tantangan yang dihadapi Yordania dalam ha perekonomian, GNP per kapita menampakkan kenaikan mencapai 6% setiap tahunnya yang diupayakan melalui hasil pertanian, perkembangan dalam mengolah bahan tambang lain seperti tekstil, semen dan plastik. Selain upaya negara untuk memberdayakan ekonomi, didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya secara adil dan makmur. Menurut Ibnu Khaldun aktivitas ekonomi, luasnya pasar, jumlah dan pembagian tenaga kerja, tunjangan, fasilitas, dan peralatan yang disediakan negara turut mempengaruhi kesejahteraan dan peningkatan pembangunan pada suatu negara. Semakin intensif aktivitas yang dilakukan menandakan negara semakin besar yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tabungan negara hingga terwujudnya pembangunan dan upaya kesejahteraan.

Yordania dapat menunjukkan relasi antara negara dengan suku bangsa dalam proses transformasinya menuju negara-bangsa yang modern, seperti diadakannya pemilihan umum

sebagai salah satu tanda liberalisasi yang mulai memasuki negara ini. Walaupun Yordania tidak sepenuhnya menerima demokratisasi karena dicurigai sebagai alat penguasaan kekayaan Timur Tengah berupa sumber daya minyak. Kekuasaan pada masa kerajaan Hasyimiyah Yordania memiliki tatanan politik maupun legitimasi kekuasaan yang secara eksplisit telah mengakomodasi tribalisme. Kekuasaan kerajaan yang terbentuk dapat dimanfaatkan bagi kelompok kesukuan untuk turut serta mengintegrasikan diri pada sistem negara yang modern dengan mempertahankan budaya primordial. Usaha mengintegrasikan kelompok kesukuan dengan pemerintah memiliki andil besar pada integrasi wilayah tepi barat setelah perang arab-israel berakhir, pembunuhan Raja Abdullah I, Gejolak *Arab Spring* 2011. Pada peristiwa-peristiwa tersebut dapat mempertahankan kekuasaan Bani Hasyim dengan Dukungan kesukuan dan ashabiyah hingga hari ini Dinasti Hasyimiyah telah bertahan selama empat generasi meski sempat terjadi reformasi politik di Yordania. Kekuasaan Bani Hasyim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berjalannya politik di Yordania. Dimana Bani Hasyim memiliki faktor ashabiyah berupa hubungan persaudaraan yang kuat yang mendukungnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afeef, Nouran Ali, E. V. Savenkova, and Alexandr Y. Bystryakov. "Economy of Jordan: Obstacles and Prospects of Progress of a Developing Economy." In , 71–75. Atlantis Press. 2018. <https://doi.org/10.2991/icemw-18.2018.14>.
- Afriaanti, Wahyuni, and S. n.d. "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Yordania dan Turki," 2022.
- Aryanti, Yosi. "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun: Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik." *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 2 (2). <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256>.
- Farhan, Izzal Toriqul. 2022. "Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan RELEVANSINYA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4 (1). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1446>.
- Febrian, Emil Dwi, Susanto Susanto, and Sri Kusumo Habsari. 2021. "Runtuhnya Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun." *Jurnal Filsafat* 31 (1): 74–104. 2018. <https://doi.org/10.22146/jf.49944>.
- Gacem, Rajaa. n.d. "Tribes and States In The Middle East". 2019.
- Hamad, Aref. "The Impact of Political Reforms on Stability in Jordan: (2011-2018)." *Open*

*Journal of Political Science* 09 (January): 122–44. 2019.  
<https://doi.org/10.4236/ojps.2019.91007>.

Hana, Muhamad Yusrul. “Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, November, 35. 2020. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2064>.

Hartanto. “Tinjauan Konstruktivisme Dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa | Hartanto | Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.” *TAPIS : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16 (2). 2020. <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/7788>.

Insani, Risna Nurul, and Indra Indra. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada 20 Negara OKI Tahun 2009-2013.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (2): 141–56. 2015. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.141-156>.

Khoiruddin. “Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *ASAS* 8 (1). 2016. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224>.

Luhtitianti, UI Ardaninggar, and Achmad Zainal Arifin. “Applying Ibn Khaldun’s Theory Into The Islamic Preaching’s Movement in The Period of Demak Empire: Reflection for the Contemporary Muslim Society.” *RELIGIA*, April, 1. 2021. <https://doi.org/10.28918/religia.v24i1.2807>.

Malau, Nathania Cevlin Gloria. “Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Negara Yordania Pada Pemilihan Umum Tahun 2016.” Thesis, Universitas Sumatera Utara. 2020. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27861>.

Nizar, Samsul. “Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun.” *Jurnal Demokrasi* 2 (1). 2003. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2547>.

Saukani, Muhammad Izzu. “Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan ‘Solusi Dua Negara’ Dalam Konflik Israel-Palestina.” Universitas Islam Indonesia. 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28434>.

Sriyanto. *Sejarah Dan Perubahan Sosial : Pemikiran Intelektual Ibnu Khaldun*. UM Purwokerto Press. 2018. <http://digital.library ump.ac.id/540/>.

Subchan, Nizzah Amalia. “Faktor Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordania dengan Qatar : Analisis Dinamika Keamanan Kawasan dan Identitas Nasional.” *Indonesian Journal of International Relations* 4 (1): 25–41. 2020. <https://doi.org/10.32787/ijir.v4i1.119>.

Sudjatnika, Tenny. “Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14 (1): 127–40. 2017. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v14i1.1796>.

Yani, Muhammad Turhan. “Wacana Pemerintahan Demokris dan Dinamika Politik di Negeri-

negeri Timur Tengah: Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Iran, dan Turki.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 1 (2): 121. 2014. <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.1.2.121-134>.

Yulianto, Nawan, and Muhamad Syauqillah. “Aşabiyyah dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibn Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik dan Tribalisme di Timur Tengah” 6 (1): 21. 2019.

### WEBSITE

Massad, Joseph. “Palestinian Rights Have Always Been Secondary to the “national Interest” of Arab Regimes”. Dalam <https://www.middleeasteye.net/opinion/bargaining-away-palestinian-rights-serves-national-interest-arab-regimes> diakses pada 19 Juni 2022

Anggaran. “Rezim Negara Arab Mendahulukan Kepentingan Nasionalnya Dibanding Hak-Hak Palestina” dalam <https://www.klikanggaran.com/politik/amp/pr-115965999/rezim-negara-arab-mendahulukan-kepentingan-nasionalnya-dibanding-hakhak-palestina?page=all> diakses pada 19 Juni 2022